

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo

6.1.1.1 Penyuluhan dan Motivator Masyarakat

a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dalam Peran program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mewujudkan pembangunan desa berperan penting karena dengan adanya penyuluhan dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Peran PKK sebagai penyuluhan di Desa Leguderu kurang baik, dikarenakan masih ada ibu-ibu yang kurang respon atau kurang aktif dalam kegiatan sosialisasi. Tetapi para pengurus PKK selalu melakukan penyuluhan agar ibu-ibu mau bergerak dalam kegiatan PKK

b. Motivasi

Dalam pelaksanaan peran PKK dalam mewujudkan pembangunan desa motivator atau motivasi sangat dibutuhkan. Motivator atau motivasi yang dijalankan di Desa Leguderu sudah cukup baik. Motivator atau motivasi dikatakan cukup baik karena peran pemerintah desa yang selalu memberikan

dorongan kepada para anggota PKK dan masyarakat agar mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan 10 program pokok PKK.

Hasil analisis dapat disimpulkan melalui keseluruhan data yang dikumpulkan, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dapat disimpulkan bahwa peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mewujudkan Pembangunan kurang baik. Karena masih banyak ibu-ibu yang tidak aktif dalam kegiatan penyuluhan, tetapi pemerintah desa dan pengurus PKK tetap memotivasi atau mendorong mereka agar mereka mau dan melakukan kegiatan-kegiatan PKK yang telah direncanakan oleh PKK.

1.1.1.2 Fasilitator, Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan PKK

a. Fasilitator

Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai fasilitator dalam pembangunan desa sudah berfungsi dengan baik. Karena dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat memenuhi perekonomian dan memperlancar kegiatan mereka.

b. Perencanaan

Di Desa Leguderu belum memiliki perencanaan kerja selanjutnya, dikarenakan tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Sehingga kegiatan yang sebelumnya belum selesai.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan program kerja PKK di Desa Leguderu belum berjalan dengan baik karena masih ada kegiatan yang belum terealisasikan dan kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga menghambat kegiatan-kegiatan program kerja PKK yang sudah dijalankan.

Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dapat disimpulkan bahwa peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mewujudkan Pembangunan belum kurang baik. Karena tidak ada partisipasi dalam kegiatan program kerja PKK. Sehingga kegiatan yang dijalankan belum bisa direalisasikan

1.1.2 Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Meningkatkan Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan peran PKK dalam mewujudkan pembangunan yaitu walaupun masih ada ibu-ibu yang tidak berpartisipasi, rendahnya tingkat pendidikan, anggota PKK yang menganggap PKK itu mengganggu kegiatan mereka, dan ada juga belum terealisasi sebagian program PKK. Namun pemerintah desa dan para pengurus PKK selalu memberikan mereka penyuluhan, motivasi, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan, agar mereka dapat mengerti dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKK.

6.2 Saran

1. Kepada pemerintah Desa Leguderu agar dapat memberikan dorongan atau motivasi perempuan Desa Leguderu yang belum mengikuti program PKK, karena kegiatan PKK juga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dapat membantu meningkatkan kemandirian perempuan
2. Kepada PKK Desa Leguderu, sebagai salah satu organisasi perempuan agar lebih inovatif lagi mengajak dan memberikan kegiatan PKK yang lebih baik lagi untuk masyarakat
3. Kepada masyarakat Desa Leguderu, perlu mendorong atau memotivasi perempuan di lingkungan sekitarnya yang belum mengikuti program PKK agar dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dapat membantu mewujudkan pembangunan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H dan Soejono. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Anwar, Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Bintarto, 1989. *Interaksi Dasar-Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bungin, Burhan H.M. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup
- Ensiklopedia Indonesia. 1999.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Kansil, C.S.T. 1983. *Sistem Pemerintahan Indonesia*
- Lemhanas.1997. *1. Indonesia-Pembangunan Nasional. 2. Garis-Garis Besar Haluan Negara Subyek*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Marbun, B.N. 1997. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Meleong, L. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Michael, Todaro. 1977. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Mubyarto, 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES
- Pratikno, Riyono. 1979. *Komunikasi Pembangunan. Bandung: Alumni*
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta Gramedia.

Siagian, Sondang P. 2003. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara

Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sy, Pahmi. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press

Tjokroamidjojo, bintoro. 1983. *Pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Undang-Undang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2013 *Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2007 *tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*

Permendes PDTT No. 13 Tahun 2010 *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*

Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara Bersama Bapak Alfonsius Pino Selaku Sekretaris Desa

Leguderu



Gambar 1.2 Wawancara Bersama Ibu Dorce Ruda Selaku Anggota PKK



Gambar 1.3 Wawancara Bersama Masyarakat Desa Leguderu